

LAMPIRAN

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**



Diajukan Oleh
Yoga Wisnu Prayuda
22919031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh

Yoga Wisnu Prayuda

22919031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN
EKONOMIKA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

Tesis

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

YOGA WISNU PRAYUDA

No. Mhs. : 22919031

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is placed below the text 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 19 Agustus 2024


METERAI
TIMPAK
19/08/2024 12:25
Wega Wisnu Prayuda

Tesis

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh

Yoga Wisnu Prayuda

22919031

Telah disetujui oleh :

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing

Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya tulis ilmiah ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua serta adik saya, yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan mendoakan saya
- Almamater saya Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, yang merupakan salah satu persyaratan akademik bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang magister di Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, petunjuk, data, dan saran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis.
5. Ayah, ibu, serta adik yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan selama penulis menjalani studi hingga akhir penulisan tesis ini.

6. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap dengan adanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Yoga Wisnu Prayuda'.

Yoga Wisnu Prayuda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I:	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II: LANDASAN TEORI	10
2.1 Teori Agensi	10
2.2 Otonomi Daerah	11
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah	12
2.4 Kinerja Keuangan	13
2.5 Pengembangan Hipotesis	21
BAB III: METODE PENELITIAN	32
3.1 Bentuk Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Sumber Data	33

3.4 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel	34
3.5 Metode Analisis Data	37
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.3 Uji Asumsi Klasik	45
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.5 Analisis Koefisien Determinasi	53
4.6 Uji F	54
4.7 Uji t	54
4.8 Pembahasan	56
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan Penelitian	66
5.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
4.1 Kriteria Populasi	42
4.2 Statistik Deskriptif	43
4.3 Pengujian Normalitas	
46	
4.4 Pengujian Normalitas Setelah Outlier	
47	
4.5 Pengujian Multikolinearitas	
48	
4.6 Pengujian Heteroskedastisitas	
49	
4.7 Analisis Regresi Linier Berganda	
51	
4.8 Rekapitulasi Pengujian Hipotesis	
63	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Konseptual	31
-------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pasca covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 80 kota dan kabupaten di Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa total aset, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan, jumlah penduduk daerah, PAD, dan IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk perekonomian dan keuangan. Dalam pandemi ini, pemerintah di seluruh dunia harus mengambil tindakan drastis untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Tindakan pembatasan sosial, *lockdown*, dan penutupan seluruh bisnis telah menyebabkan gangguan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat penting untuk dicermati. Penting untuk memahami bagaimana pandemi covid-19 berdampak pada pendapatan dan belanja pemerintah serta situasi keuangan secara keseluruhan. Contohnya saja pada daerah Jawa Tengah yang mengalami penurunan pendapatan daerah sebanyak Rp 169 M dan pendapatan asli daerah dari kota Jakarta mengalami penurunan sebesar 50 persen pada tahun 2020. Selain itu, diperlukan analisis menyeluruh mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk menghadapi dampak ekonomi dari pandemi ini dan bagaimana langkah-langkah tersebut mempengaruhi kesehatan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya bisa dijadikannya sebagai tolok ukur kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir. Laporan keuangan yang baik bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat

dan juga bisa meningkatkan efisiensi kinerja keuangan dari pemerintah dan bisa mengidentifikasi masalah yang harus diperbaiki dan menghindari pemborosan anggaran. sedangkan laporan keuangan yang buruk berpotensi menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. Kinerja keuangan yang buruk akan membuat perekonomian di Indonesia juga akan memburuk menyebabkan inflasi yang ada di Indonesia meningkat. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menstabilkan kinerja keuangan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan anggaran yang digunakan secara efektif diharapkan mampu mengatasi dampak yang terjadi selama anggaran tersebut dikelola secara efisien dan transparansi. Penggunaan anggaran yang dikelola secara efisien dan transparansi bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu dikarenakan pengelolaan keuangan yang baik bisa memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat.

Berdasarkan isu-isu yang sudah terjadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi tolok ukur pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta peningkatan kualitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Aspek yang pertama adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan membuat pemerintah leluasa dalam menjalankan operasional pemerintahannya dan memberikan kemudahan dalam pemerintah memberikan pelayanan ke

masyarakat. Namun, ukuran pemerintah daerah yang besar akan berdampak pada kompleksitas dalam pengambilan keputusan serta ukuran pemerintahan daerah yang besar akan memberikan risiko terhadap penyalahgunaan dana. Ukuran pemerintah daerah diproksikan menjadi total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penelitian milik Manafe, et al., (2023), Banunaek (2022), Adinanta (2022), Sarikadarwati dan Safitri (2021), Mauliana (2021), Nurhayati dan Hamzah (2020), Siregar (2020), Rusmita (2019), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Aspek yang kedua adalah jumlah penduduk daerah. Meningkatnya jumlah penduduk bisa berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah melalui pajak, retribusi daerah, dan pendapatan daerah. Semakin banyak jumlah penduduk yang hidup maka semakin banyak pula opsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Namun, meningkatnya jumlah penduduk bisa berdampak negatif bagi pemerintah dikarenakan pemerintah harus menyediakan layanan bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Penelitian milik Alfi dan Sari (2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aspek yang ketiga adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah pada pusat akan menyebabkan pemerintah daerah kurang mandiri dan terkesan hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Tingginya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana

yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi akan dana pemerintah pusat bisa disebabkan dari beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya yang kurang memadai, kebijakan sentralistik oleh pemerintah pusat, dan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Namun, hal tersebut bukan alasan yang dapat digunakan apabila tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada pusat. Buruknya pengelolaan keuangan menyebabkan dana tidak tersalurkan dengan baik. Penelitian milik Setiani dan Ismunawan (2022), Primadiva dan Mulyani (2021) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Aspek keempat adalah *leverage* atau tingkat utang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan lembaga kreditur demi membantu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini pun tertulis di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015. Yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan. Namun perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan pinjaman langsung ke luar negeri dan tidak boleh menggunakan jaminan terhadap pinjaman bank lain. Tingkat hutang yang tinggi memberikan sinyal bahwa kurangnya kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Manafe, et al., (2023), Banunaek, et al., (2022) menyatakan bahwa *leverage* atau tingkat hutang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aspek yang kelima adalah pendapatan asli daerah atau disingkat PAD merupakan sebagai salah satu fondasi dari pembiayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingginya PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan membuat pemerintah daerah memberikan pelayanan dan pembangunan ke masyarakat secara luas, namun PAD yang rendah akan membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Padang dan Padang (2023), Banunaek, et al., (2022), Maulina (2021), Sari dan Halmawati (2021), Antari (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang motivasi penulis dalam penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pasca covid-19. Faktor-faktor yang berpotensi untuk berpengaruh diantaranya adalah total aset, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, *leverage* dan pendapatan asli daerah. Penelitian mempunyai kebaruan dalam hal variabel yang digunakan, dikarenakan penelitian mengenai faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi masih jarang ditemukan dan penelitian tersebut ditemukan masih terbatas pada dua hingga tiga variabel saja. Peneliti juga menambahkan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penggunaan indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini adalah dikarenakan indeks pembangunan manusia mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan

standar hidup masyarakat yang mana hal tersebut merupakan poin penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah jumlah penduduk daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
5. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh total aset, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan daerah, *leverage*, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjawab pertanyaan dari beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi akademis

Bagi dunia Pendidikan sendiri diharapkan informasi mengenai penelitian kinerja keuangan dapat membantu dalam memahami faktor-faktor apa saja menjadi pengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Indonesia. Serta menjadi acuan jika ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan variabel-variabel yang lebih komprehensif dan lebih luas.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan atau kebijakan publik yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, motivasi peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan pada penelitian ini, penelitian terdahulu mengenai variabel penelitian yaitu: total aset, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan keuangan, *leverage*, pendapatan asli daerah, dan indeks pembangunan manusia.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, informasi populasi dan sampel, pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perhitungan dalam penelitian, termasuk hasil analisis yang telah ditentukan, dan juga pada bab ini akan dijelaskan terbukti atau tidaknya hasil hipotesis yang telah ditentukan.

BAB V

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan termasuk kesimpulan, saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. Landasan Teori

2.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori ekonomi yang membahas hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan perintah atau instruksi kepada pihak agen untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan agen merupakan pihak yang menerima perintah maupun instruksi dari prinsipal dan bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling berpendapat bahwa hubungan antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Konflik kepentingan yang berkelanjutan dapat menjadi kerugian bagi organisasi seperti biaya agensi yang muncul akibat dari konflik kepentingan. Menurut Kurniadi dan Wardoyo (2022) teori keagenan ini merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Sedangkan menurut Mahdiana dan Amin (2020) teori agensi mengasumsikan masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.

Dalam konteks pemerintahan, yang bertindak sebagai prinsipal adalah masyarakat daerah sedangkan agen adalah pemerintah daerah yang diberikan

instruksi dari prinsipal untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen akan melaksanakan instruksi tersebut dan mencapai hasil berupa kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Namun, konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya bisa seperti pemerintah daerah memiliki informasi lebih banyak dari masyarakat dan tidak mengungkapkan kepada masyarakat sekaligus. Maka dari itu peneliti memutuskan menggunakan beberapa variabel penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya adalah: total aset, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, *leverage*, dan pendapatan asli daerah.

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom memiliki landasan peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Aladin, et al., (2021) yang mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Adinanta dan Efendi, (2022) otonomi daerah merupakan suatu kewajiban atau wewenang yang diberikan kepada daerah otonom dalam melaksanakan tugasnya seperti mengatur, mengendalikan, dan mengurus

sendiri terkait kepentingan daerah masing-masing. Otonomi daerah yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini dikarenakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangannya.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan milik negara atau daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah juga disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Menurut Ariyanto (2020) laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Sedangkan menurut peraturan pemerintah, laporan keuangan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dari pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Contohnya saja jika pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan maka hal

tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatannya.

2.4 Kinerja Keuangan

Kuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Aladin, et al., (2021) kinerja merupakan prestasi kerja yang diterima dalam menjalankan program dalam periode tertentu, sedangkan menurut Maulina, et al., (2021) kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Mahmudi (2019) analisis efisiensi dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan di masing-masing daerah di Indonesia. Semakin tinggi tingkat efisiensi semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil kerja keras pemerintah dibidang keuangan dalam satu tahun periode akuntansi berjalan. Pencapaian yang telah diraih pemerintah meliputi belanja daerah atau penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri akan berdampak pada laporan keuangan yang mana hal tersebut juga akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah apakah menjadi baik atau buruk.

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU MENGENAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Alfi dan Sari (2023)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: <i>leverage</i>, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2	Manafe et al., (2023)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah ● <i>Leverage</i> berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
3	Padang dan Padang (2023)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4	Adinanta dan Efendi (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: <i>leverage</i>, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ● Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
5	Dewanti et al., (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
6	Setiani dan Ismunawan (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat ketergantungan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan
7	Banunaek et al., (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, <i>leverage</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah ● Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah ● <i>Leverage</i> berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
8	Aladin et al., (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ● bebas: kekayaan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, ukuran daerah, belanja daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
9	Maulina et al., (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● bebas: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan variabel kinerja keuangan. ● Ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel kinerja keuangan
10	Primadiva dan Mulyani (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja pemerintah daerah ● Bebas: tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
11	Sari dan Halmawati (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ● Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
12	Nurhayati dan Hamzah (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
13	Verawaty et al., (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pendapatan asli daerah dan dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
14	Abubakar. A (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: <i>financial performance</i> ● Bebas: <i>financial leverage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Financial leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial performance</i>
15	Siregar (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pendapatan asli daerah, ukuran daerah, <i>leverage</i> dan dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
16	Gustianra dan Serly (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja pemerintah daerah ● Bebas: <i>good governance government</i> dan ukuran legislatif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
17	Sari (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat kemandirian, tingkat kemakmuran, dan <i>leverage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan ● <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan
18	Antari dan Sedana (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pendapatan asli daerah dan belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
19	Kurniadi dan Wardoyo (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> ● Bebas: ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, dewan komisaris, <i>leverage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● teori keagenan ini merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan.
20	Mahdiana dan Amin (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: <i>tax avoidance</i> ● Bebas: profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● teori agensi mengasumsikan masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.
21	Ariyanto (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kualitas laporan keuangan ● Bebas: penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> ● laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
22	Sari dan Mustanda (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ● Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
23	Mulyani dan Wibowo (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan ● Bebas: belanja modal, ukuran pemerintah daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ● Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		<i>intergovernmental revenue</i> , dan pendapatan asli daerah	
24	Putri dan Amanah (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ● Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
25	Mappiasse (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan ● Bebas: ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, ukuran legislatif, temuan audit, opini audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ● Tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan ● Ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
26	Karno dan Aliyah (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat kinerja keuangan ● Bebas: ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, ukuran legislatif, opini audit BPK 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ● Ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
27	Pratama., et al. (2022)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemda ● Bebas: opini audit BPK, pendapatan asli daerah, <i>intergovernmental revenue</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi signifikan negatif pada kinerja keuangan pemda

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
28	Ginting., et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: kinerja keuangan pemerintah daerah ● Bebas: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
29	Astuti dan Mispiyanti (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Terikat: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia ● Bebas: kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Total Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya. Menurut Rusmita (2019) ukuran pemerintah daerah menggunakan pengukuran total aset dalam neraca pemerintah daerah. Maka dari itu ukuran pemerintah daerah diproksikan menjadi total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Selanjutnya, teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dalam konteks pemerintah pihak yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah sedangkan untuk prinsipal adalah masyarakat. Aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah dalam membiayai program-program yang mana hal tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah. Namun, aset yang besar memiliki potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang menyebabkan agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.

Menurut Manafe et al., (2023) total aset yang besar memberikan akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Maka dari itu pemerintah daerah yang memiliki aset yang berukuran besar diharapkan dapat memiliki kinerja

keuangan yang lebih baik ketimbang pemerintah daerah yang berukuran kecil. Total aset yang besar akan memberikan pemerintah daerah leluasa dalam memberikan pelayanan ke masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jadi semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah daerah dalam memberikan layanan ke masyarakat.

Berdasarkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Manafe, et al., (2023), Adinanta (2022), Sarikadarwati dan Safitri (2021), Nurhayati dan Hamzah (2020), Siregar (2020), Banunaek (2022), Mauliana (2021), Rusmita (2019), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penduduk adalah masyarakat yang sudah menetap atau tinggal di daerah tersebut dalam waktu yang cukup lama dan memiliki tujuan untuk tinggal dalam waktu yang lama. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang

berbeda, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk melakukan suatu tugas, dan agen menerima mandat dari prinsipal untuk melakukan tugas tersebut. Menurut Alfi dan Sari (2023) jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal pada suatu daerah dan memiliki mata pencarian tetap di daerah. Banyaknya jumlah penduduk yang menetap bisa berdampak positif bagi pemerintah daerah dikarenakan jumlah penduduk daerah yang banyak secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya. Namun jumlah penduduk daerah yang banyak berpotensi untuk meningkatkan beban anggaran dari pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah harus meningkatkan layanan ke masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut Dewanti, et al., (2022) ukuran pemerintah daerah berkaitan dengan teori keagenan ketika pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan aset untuk kepentingan publik. Sedangkan menurut Alfi dan Sari (2023) jumlah penduduk daerah dapat diukur dengan cara melihat jumlah penduduk yang menetap suatu daerah di kota atau kabupaten. Jumlah penduduk yang banyak bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Maka dari itu, semakin banyak jumlah penduduk daerah sebagai prinsipal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebagai agen.

Berdasarkan tinjauan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah penduduk daerah dapat meningkatkan opsi keuangan yang

dimiliki pemerintah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan Alfi dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Jumlah penduduk daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5.3 Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat ketergantungan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu tingkat ketergantungan yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah berpotensi untuk memprioritaskan proyek yang diminta oleh pemerintah pusat dibandingkan proyek yang diminta oleh masyarakat. Tingkat ketergantungan yang rendah akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam mengelola keuangannya bagi masyarakat. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat

dapat dilihat dengan cara membandingkan dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah. Angka tersebut menunjukkan besaran dana bantuan dari pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang disiapkan untuk pemekaran daerah otonomi yang belum stabil. Menurut Setiani dan Ismunawan (2022) tingkat ketergantungan bisa diketahui dari banyaknya dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari informasi tersebut teori agensi dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat ketergantungan maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah rendah maka mereka memiliki sumber pendapatan yang mandiri seperti pajak dan retribusi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kontrol yang besar atas kebijakan fiskal mereka sendiri.

Berdasarkan informasi di atas maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat maka akan semakin baik kinerja keuangannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Setiani dan Ismunawan (2022), Primadiva dan Mulyani (2021) yang menyatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5.4 *Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Menurut teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dikarenakan agen memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang prinsipal, sehingga agen dapat mengambil tindakan yang bisa merugikan prinsipal. Dalam hal ini berpotensi untuk terjadinya konflik seperti pemerintah daerah yang menggunakan hutang yang berlebihan untuk membiayai pengeluarannya. *Leverage* yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah memiliki utang yang lebih besar daripada ekuitas. Penggunaan utang yang berlebihan dapat menimbulkan risiko keuangan pemerintah daerah. Risiko keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman uang pada Lembaga keuangan selama bukan Lembaga keuangan luar negeri. Menurut Abubakar (2020) *leverage* keuangan merupakan campuran utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan sedangkan menurut Adinanta dan Efendi (2022) *leverage* adalah hasil perbandingan utang dan

modal. Yang mana *leverage* merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah *leverage*, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dan mengalokasikan keuangannya dengan baik. Menurut Alfi dan Sari (2023) *leverage* dapat diukur dengan cara menggunakan *debt to equity ratio*. Rendahnya *leverage* akan membuat pemerintah daerah semakin mandiri untuk mencari pendapatan alternatif guna memberikan pelayanan ke masyarakat dan semakin rendah nilai *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan informasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah maka akan semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan milik Alfi dan Sari (2023), Siregar (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5.5 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah

dalam membangun daerah otonomnya. Teori keagenan yang dirumuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggunakan hubungan antara prinsipal dan agen. Pendapatan asli daerah atau PAD yang tinggi di pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan PAD yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut. PAD yang tinggi akan memiliki lebih banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut Sari dan Halmawati (2021) PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu dalam meminimalisir ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan rencana programnya ketimbang PAD yang rendah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi akan membuat pemerintah leluasa dalam menjalankan operasional dan memberikan pelayanan ke masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan Padang dan Padang (2023), Banunaek, et al., (2022), Maulina (2021), Sari dan Halmawati (2021), Antari (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tinjauan teori diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5.6 Indeks Pembangunan Manusia

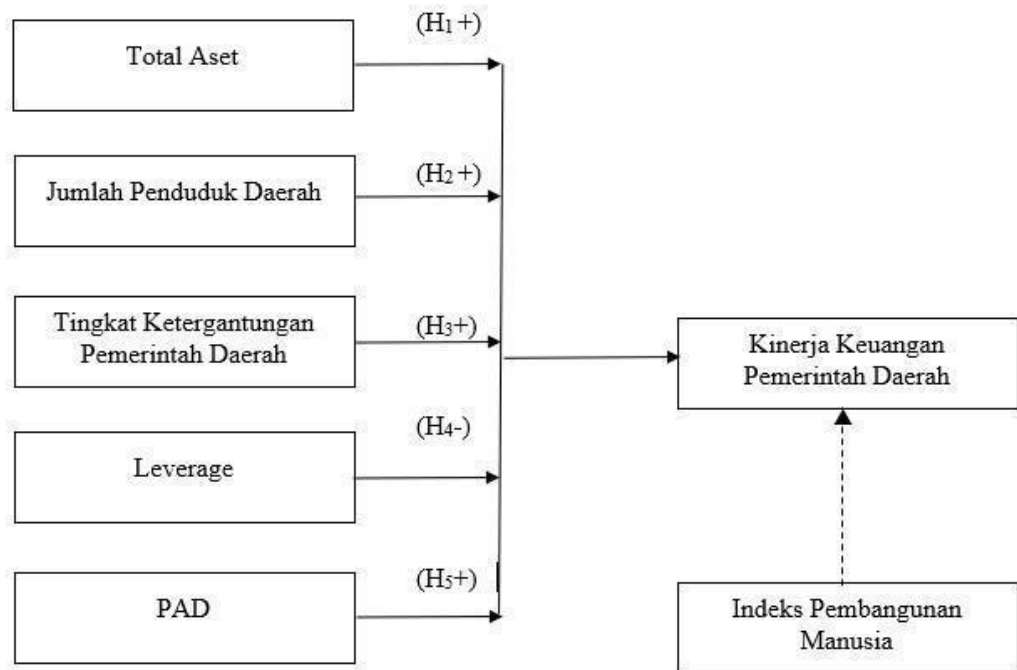
Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia atau IPM sendiri dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Menurut (Herdiansyah dan Kurniati, 2020) indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah untuk masyarakat, sedangkan menurut (Mohammad Fauzan et al., 2020) bagi pemerintah IPM merupakan data strategis yang digunakan untuk mengukur ukuran kinerja . Tingkat IPM yang tinggi dalam suatu daerah menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Selain itu, tingkat IPM yang tinggi juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan IPM bukan hanya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi IPM di suatu daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya juga akan semakin baik. Hal ini dikarenakan IPM yang tinggi akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan sehingga penelitian kinerja keuangan pemerintah menjadi lambat. Diantaranya adalah: pertama kurangnya variabel independen yang merepresentasikan pengaruh pada kinerja keuangan lebih baik, serta penggunaan teori yang dirasa masih belum cukup dalam menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan objek penelitian di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan pada penelitian ini peneliti memasukkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol. Penambahan variabel kontrol indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah yang murni terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

GAMBAR 1.1
KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

3. Metode Penelitian

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun variabel yang akan diteliti oleh penulis merupakan total aset, jumlah penduduk daerah, tingkat ketergantungan daerah, *leverage*, PAD, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol. Sedangkan untuk variabel terikatnya penulis menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Indonesia, peneliti memutuskan menggunakan objek penelitian seluruh Indonesia karena peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan dan melihat seberapa berhasil program yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah UU No.23 Tahun 2014 yang hanya dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan berupa data kuantitatif hal ini dikarenakan data yang digunakan menggunakan angka yang akan mewakili

variabel-variabel yang digunakan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang mana data tersebut adalah data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

a. Populasi

Menurut Chandrarin (2018) populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Berdasarkan pendapat dari Chandrarin tadi dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan sekumpulan objek maupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang mana hal tersebut akan ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil yang mewakili keunikan dari populasi, menurut Arifin (2017) sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut disebut sampel penelitian. Berdasarkan dua pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian kecil dari kelompok yang diteliti yang memiliki karakteristik unik dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Arifin (2017) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang kriterianya dipilih dan ditentukan oleh peneliti. Kriteria penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kota atau kabupaten di Indonesia yang sudah di audit laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 2) Pemerintah daerah kota atau kabupaten yang menerima dana bantuan dari pemerintah pusat.

3.4 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen

1) Kinerja Keuangan (Y)

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan:

$$\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

b. Variabel Independen

1) Total aset (X_1)

Ukuran pemerintah daerah adalah besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya. Aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah dalam membiayai program pemerintahannya. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \ln(\text{Total Aset})$$

2) Jumlah penduduk daerah (X_2)

Penduduk adalah masyarakat yang sudah menetap atau tinggal di daerah tersebut dalam waktu yang cukup lama dan memiliki tujuan untuk tinggal dalam waktu yang lama. Semakin banyak jumlah penduduk daerah dapat meningkatkan opsi keuangan yang dimiliki pemerintah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah tinggal di daerah tersebut.

3) Tingkat ketergantungan daerah (X_3)

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat di penerimaan Dana Alokasi Umum atau DAU. Semakin rendah dana alokasi umum yang

dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin mandiri pula pemerintah tersebut dalam membiayai programnya. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{tingkat ketergantungan daerah} = \frac{\text{Dana alokasi umum}}{\text{total pendapatan daerah}}$$

4) *Leverage* (X₄)

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin rendah *leverage* maka semakin mandiri pula pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai programnya. *Leverage* dapat diukur menggunakan rasio *debt to equity ratio*:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{ekuitas}} \times 100$$

5) Pendapatan Asli Daerah (X₅)

Pendapatan asli daerah merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya. PAD yang tinggi di pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan PAD yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan asli daerah dapat dilihat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD tahun 1}}{\text{PAD tahun} - 1} \times 100$$

3.5 Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengukur apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-smirnov* adalah uji statistik yang membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 maka data dianggap berdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk melihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Satu diantara kriteria untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas pada suatu model adalah: Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Semakin tinggi VIF, maka semakin rendah *tolerance*.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi apakah data dapat keberagaman atau perbedaan. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda adalah persamaan yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen dari dua atau lebih variabel independen.

Bentuk umum dari persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + \dots + \varepsilon$$

Penjelasan:

Y = variabel dependen (kinerja keuangan)

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, B_5 = koefisien regresi variabel

X_1 = ukuran pemerintah daerah

X_2 = jumlah penduduk

X_3 = tingkat ketergantungan daerah

X_4 = *leverage*

X_5 = pendapatan asli daerah

X_6 = indeks pembangunan manusia

ε = *error*

5) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau (R^2) merupakan sebuah uji yang mengukur sejauh mana sebuah variabel penelitian menjelaskan variasi dari variabel dependen. Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi dapat memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik model regresi tersebut dalam memprediksi variabel dependen.

6) Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji model penelitian, apakah model yang telah dibangun dapat memberikan penjelasan yang baik pada variabel dependen. kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka model penelitian dinyatakan layak, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dinyatakan tidak layak.

7) Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel independen dalam memberikan pengaruh variabel dependen. Jika nilai signifikansi (Sig) $<$ probabilitas 0,05 maka dapat dipastikan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) $>$ probabilitas 0,05 maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Penelitian ini menggunakan bentuk asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan ln (total aset), jumlah penduduk daerah diukur dengan melihat jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut, tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah yang diukur dengan membandingkan dana alokasi umum dengan total pendapatan, *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio*, dan PAD yang diukur dengan membanding total PAD tahun sebelumnya. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Peneliti juga memasukkan variabel kontrol berupa indeks pembangunan manusia atau IPM.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 sampel, data sampel yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Penulis juga menggunakan data non keuangan berupa jumlah penduduk daerah. Populasi yang digunakan adalah sebanyak 514 pemerintah daerah yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.

Sampel yang diambil dari 50 pemerintah daerah di 5 pulau besar dan 30 pemerintah daerah lainnya di pulau-pulau kecil. Maka dari itu pengambilan sampel adalah sebanyak 80 pemerintah daerah. Jumlah ini mewakili sekitar 15.5 persen dari total jumlah pemerintah daerah di Indonesia. Berikut ini disajikan tabel penjelasan mengenai populasi dan sampel penelitian

TABEL 4.1
Kriteria Populasi

No	Keterangan	Hasil
1	Jumlah pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Indonesia dari tahun 2018 - 2022	514
2	Jumlah sampel pemerintah kota dan kabupaten	80
3	Jumlah data penelitian selama 5 tahun	400

Sumber data olahan 2024

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Oleh karena itu, statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Hasil dari analisis statistik deskriptif berjumlah 400 data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 s.d. 2022. Berikut ini akan disajikan Tabel 4.2 yang merupakan hasil analisis statistik deskriptif:

TABEL 4.2
STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Total aset (log)	400	27,812	31,579	29,011	0,812
Jumlah penduduk (satuan)	400	34,654	3,3622,450	576,280	665,267
Tingkat ketergantungan keuangan (%)	400	0,124	1,097	0,440	0,127
<i>Leverage</i>	400	0,0003	0,2220	0,0200	0,0281
PAD (%)	400	0,525	10,832	1,067	0,522
IPM (satuan)	400	7,03	87,72	76,022	6,133
Kinerja keuangan (%)	400	0,090	1,284	0,879	0,1280

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel penelitian terdiri dari ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan ln (total aset), jumlah penduduk daerah diukur dengan melihat jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut selama lebih dari 6 bulan, tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah yang diukur dengan membandingkan dana alokasi umum dengan total pendapatan, *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio*, dan PAD yang diukur dengan membandingkan total PAD tahun sebelumnya. Peneliti juga memasukkan variabel kontrol berupa indeks pembangunan manusia.

Pada ukuran pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,81 yang dimiliki oleh kota Kotamobagu pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 31,57 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2022. Sedangkan nilai rata-rata

ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 29,0115 dengan standar deviasi sebesar 0,8120799.

Jumlah penduduk daerah memiliki nilai minimum sebesar 34,654 yang dimiliki oleh kota Sabang pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 3,362,450 yang dimiliki oleh kota Bekasi pada tahun 2022. Sedangkan nilai rata-rata jumlah penduduk daerah adalah sebesar 576,280 dengan standar deviasi sebesar 665,267.

Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 0,1246 yang dimiliki oleh kota Bontang diperoleh dari DAU sebesar Rp224.104.355.490,00 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1.797.913.747.494,00 pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 1,0971 dimiliki oleh kota Ternate diperoleh dari DAU sebesar Rp990.182.959.600,00 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp902.529.838.141,00 pada tahun 2018. Sedangkan untuk nilai rata-rata tingkat ketergantungan keuangan adalah sebesar 0,440634 dengan standar deviasi sebesar 0,1271139.

Leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,00034 yang dimiliki oleh kota Kupang diperoleh dari total utang sebesar Rp1.038.646.918,00 dengan total ekuitas sebesar Rp3.060.756.229.440,00 pada tahun 2019. Nilai maksimum *leverage* ada sebesar 0,2220 dimiliki oleh kota Gorontalo diperoleh dari total utang sebesar Rp317.892.756.668,00 dengan total ekuitas sebesar Rp1.431.992.381.626,00 pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai rata-rata *leverage* adalah sebesar 0,2220 dengan standar deviasi 0,0281589.

PAD memiliki nilai minimum sebesar 0,5251 yang dimiliki oleh kota Blitar. diperoleh dari hasil PAD tahun berjalan Rp156.268.172.004,00 dengan PAD tahun berjalan-1 sebesar Rp297.618.527.754,00 pada tahun 2022. Nilai maksimum PAD adalah sebesar 10,8323 yang dimiliki oleh kota Prabumulih diperoleh dari hasil PAD tahun berjalan Rp875.053.633.672,00 dengan PAD tahun berjalan-1 sebesar Rp80.782.256.532,00 pada tahun 2022. Nilai rata-rata PAD adalah sebesar 1,067795 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,5222640.

Nilai minimum IPM adalah sebesar 7,03 yang dimiliki oleh kota Prabumulih pada tahun 2020. Nilai maksimum IPM adalah sebesar 87,72 yang dimiliki oleh kota Yogyakarta pada tahun 2022. Nilai rata-rata IPM adalah sebesar 76,0226 dengan standar deviasi 6,13314.

Kinerja keuangan memiliki nilai minimum kinerja keuangan adalah sebesar 0,0905 yang dimiliki oleh kota Tanjungpinang yang diperoleh dari beban operasional sebesar Rp86.179.163.020,00 dan pendapatan operasional Rp952.081.148.216,00 pada tahun 2021. Nilai maksimum kinerja keuangan adalah sebesar 1,2840 yang dimiliki oleh kota Palu yang diperoleh dari beban operasional sebesar Rp1.692.457.205.197,00 dengan pendapatan operasional Rp1.318.101.455.709,00 pada tahun 2020. Nilai rata-rata kinerja keuangan adalah sebesar 0,879193 dengan standar deviasi 0,1280183.

4.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini berfungsi untuk mengukur apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Apabila hasil uji *kolmogorov-smirnov* memiliki nilai hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data residual berdistribusi normal. Apabila hasil uji *kolmogorov-smirnov* memiliki nilai hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan data residual tidak berdistribusi dengan normal. Berikut ini disajikan Tabel 4.3 yang merupakan hasil pengujian normalitas:

TABEL 4.3
PENGUJIAN NORMALITAS
One Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
n	400
Asymp Sig.	0,000

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan metode *one sample kolmogorov-smirnov test* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu data tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, dilakukan eliminasi data *outlier* dengan metode *outlier boxplot*. Data *outlier* merupakan data yang memiliki nilai ekstrim pada residual sehingga data tersebut harus dieliminasi untuk menjadikan data tersebut berdistribusi

normal. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas setelah mengeliminasi data *outlier* di Tabel 4.4:

TABEL 4.4
PENGUJIAN NORMALITAS SETELAH ELIMINASI OUTLIER
One Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
n	355
Asymp Sig.	0,200

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil data pengujian normalitas dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov-smirnov test* setelah data di *outlier boxplot* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi dengan normal. Karena data awalnya yang sebelumnya sebanyak 400 data dikurangi sebanyak 45 data menjadi 355 data.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam mengambil kesimpulan mengenai pengaruh uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Satu di antara kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas pada suatu model adalah apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model bisa dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 4.5:

TABEL 4.5
PENGUJIAN MULTIKOLINEARITAS

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Total aset	0,251	3,984
Jumlah penduduk	0,326	3,066
Tingkat ketergantungan keuangan	0,372	2,689
<i>Leverage</i>	0,974	1,027
PAD	0,984	1,016
IPM	0,929	1,077

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada variabel total aset memiliki *tolerance* sebesar 0,251 dan VIF sebesar 3,984; jumlah penduduk memiliki *tolerance* sebesar 0,326 dan VIF sebesar 3,066; tingkat ketergantungan keuangan memiliki *tolerance* sebesar 0,372 dan VIF sebesar 2,689; *leverage* memiliki *tolerance* sebesar 0,974 dan VIF sebesar 1,027; PAD memiliki *tolerance* sebesar 0,984 dan VIF sebesar 1,016; IPM memiliki *tolerance* sebesar 0,929 dan VIF sebesar 1,077 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi permasalahan pada multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan VIF <10 Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi permasalahan pada multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas berfungsi untuk melihat apakah data terdapat keberagaman atau perbedaan. Jika nilai residualnya mempunyai varian yang

sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas sendiri menggunakan metode uji *glejser*, kriteria dalam pengujian ini adalah: jika nilai signifikansi antara nilai variabel independen dengan nilai absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini disajikan Tabel 4.6 yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*:

TABEL 4.6
PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Nilai Sig.
Total aset (X_1)	0,836
Jumlah penduduk (X_2)	0,481
Tingkat ketergantungan keuangan (X_3)	0,439
<i>Leverage</i> (X_4)	0,127
PAD (X_5)	0,804
IPM (X_6)	0,878

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada variabel ukuran pemda memiliki nilai signifikansi sebesar 0,836; jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,481; tingkat ketergantungan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,439; *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,127; PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,804; IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,878. Maka dari itu, hasil pengujian dari semua variabel tidak terjadi

permasalahan heteroskedastisitas, hal ini dikarenakan semua nilai signifikansi variabel lebih besar daripada 0,05.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan hasil pengujian asumsi klasik, maka diperlukan adanya analisis persamaan regresi linear berganda. Setelah data tersebut berdistribusi normal dan tidak terjadi permasalahan pada pengujian asumsi klasik. Maka diperlukan adanya analisis regresi linear berganda dari variabel X terhadap variabel Y. Berikut ini disajikan hasil uji analisis regresi linear berganda dengan Tabel 4.7:

TABEL 4.7
ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Variabel	Tipe Variabel	Prediksi	Eliminasi Outlier, n = 355			Keterangan
			T-Stat	B	Sig	
Konstanta			-2,319	-3,064	0,21	
TA	Independen	Berpengaruh	2,334	0,993	0,020*	Didukung
JPD	Independen	Berpengaruh	-1,975	-0,022	0,049* [^]	Tidak didukung
TKK	Independen	Berpengaruh	3,607	0,107	0,000*	Didukung
<i>Leverage</i>	Independen	Berpengaruh	3,750	0,019	0,000*	Didukung
PAD	Independen	Berpengaruh	-0,418	-0,012	0,676	Tidak Didukung
IPM	Kontrol		0,324	0,014	0,746* ^{^ ^}	-
			Adj R2: 0,092			
			F: 7,009			
			Sig: 0,000			

Sumber: Data Sekunder SPSS, 2024

* hipotesis didukung *[^] beda arah dengan koefisien *^{^ ^} variabel kontrol **Legend:** TA= total aset dari ukuran pemerintah daerah, JPD=jumlah penduduk yang tinggal, TKK=Tingkat ketergantungan keuangan, leverage=jumlah utang, PAD=pendapatan asli daerah, IPM=indeks Pembangunan manusia.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y(\text{kinerja keuangan}) = -3,064 + 0,993(\text{total aset}) - 0,022(\text{jumlah penduduk}) + 0,107(\text{Tingkat ketergantungan keuangan}) + 0,019(\text{leverage}) - 0,012(\text{PAD}) + 0,014(\text{IPM}) + \varepsilon$$

Tabel 4.7 menunjukan bahwa hasil analisis persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta menunjukkan angka sebesar -3,064 dan apabila total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah, *leverage*, PAD, dan IPM bernilai nol maka kinerja keuangan sebesar 3,064.
- b. Total aset memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,993 yang berarti setiap kenaikan total aset sebesar satu satuan maka akan mampu menaikkan kinerja keuangan sebesar pemerintah daerah 0,993.
- c. Jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,022 yang berarti setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar satu satuan maka akan mampu menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,022.
- d. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,107 yang berarti setiap kenaikan

tingkat ketergantungan keuangan sebesar satu satuan maka mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,107.

- e. *Leverage* memiliki nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,019 yang berarti setiap kenaikan *leverage* sebesar satu satuan mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,019.
- f. PAD memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,012 yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan mampu menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,012.
- g. IPM memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,014 yang berarti setiap kenaikan IPM sebesar satu satuan mampu menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,014.

4.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi adalah pengujian nilai yang memberikan kuatnya pengaruh hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, baik hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Berikut ini disajikan hasil dari pengujian untuk mengetahui hasil dari koefisien determinasi pada tabel berikut:

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi pada *Adjust R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,092 atau 9,2 persen sedangkan sisanya sebesar 90,8 persen dijelaskan di luar faktor variabel independen lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan. hasil koefisien

korelasi pada (R) menunjukkan nilai sebesar 0,328 maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi tersebut sedang atau cukup kuat dikarenakan berada pada rentang 0,300-0,499.

4.6 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menguji model penelitian variabel, apakah model yang telah sesuai dengan uji goodness of fit pada variabel dependen. Hasil dapat dikatakan telah sesuai dengan uji goodness apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka telah sesuai dengan uji goodness of fit begitu pula sebaliknya. Berikut ini disajikan berupa hasil uji F dengan Tabel 4.7.

Berdasarkan Tabel 4.7 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa keenam variabel tersebut tersebut telah memenuhi goodness of fit model.

4.7 Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel independen dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji t menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini disajikan berupa hasil pengujian uji t dengan Tabel 4.7:

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, pengujian untuk uji t dapat dijabarkan dengan sebagai berikut:

- a. Total aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05. Maka total aset berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini artinya H_1 didukung.
- b. Jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ini artinya hipotesis H_2 tidak didukung.
- c. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka tingkat ketergantungan keuangan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini artinya H_3 didukung.
- d. *Leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka *leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini artinya H_4 didukung.
- e. PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05. Maka PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini artinya H_5 tidak didukung.
- f. IPM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,746 lebih besar dari 0,05. Maka IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini artinya H_6 tidak didukung.

4.8 Pembahasan

a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H₁ Total Aset berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji pengaruh total aset terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa total aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu total aset berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan. Besarnya total aset yang dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah maka menunjukkan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Agen atau pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan mendapat kepercayaan dari prinsipal atau masyarakat. Kepercayaan ini bisa dilihat dari kemudahan dalam akses pelayanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Rusmita (2019), Siregar (2020), Nurhayati dan Hamzah (2020), Maulina (2021),

Sarikadarwati dan Safitri (2021), Banunaek (2022), Adinanta (2022), Manafe, et al., (2023) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Jumlah Penduduk Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H₂ Jumlah Penduduk Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hipotesis kedua tidak didukung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah penduduk daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor. Perlu diketahui bahwa sumber pendapatan dari pemerintah daerah adalah pajak, retribusi, dan bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu jumlah penduduk yang besar diharapkan bisa menyumbang pajak yang cukup guna membantu pembiayaan operasional di pemerintahan. Namun, besarnya

jumlah penduduk tetapi tingkat ekonomi yang rendah maka pajak yang masuk juga rendah. Tingkat ekonomi yang rendah kemungkinan disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai atau Pendidikan yang cukup. Faktor eksternal juga kemungkinan memiliki pengaruh seperti wabah covid-19 yang terjadi dua tahun yang lalu. Data jumlah penduduk diambil dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang mana pada tahun tersebut terjadi dampak covid-19 yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi Sebagian masyarakat dan menurunnya pendapatan pajak pemerintah dikarenakan tidak adanya pemungutan pajak, yang kedua adalah dampak dari covid-19 membuat beberapa perusahaan mengalami collapse hingga bangkrut. Hal ini lah yang mengurangi pendapatan pemerintah dalam segi pemungutan pajak.

c. Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H₃ Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hipotesis ketiga didukung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi akan membuat pemerintah daerah akan lebih hati-hati dalam menggunakan dana dari pemerintah pusat dikarenakan apabila pemerintah daerah gagal dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat punya hak untuk mengurangi dana bantuan yang diberikan untuk pemerintah daerah. Dalam teori agensi pemerintah daerah yang mendapatkan mandat oleh pemerintah pusat selaku prinsipal diharapkan mampu mengelola keuangan dengan baik. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat bisa berpotensi adanya masalah agensi. Maka dari itu upaya berupa mitigasi seperti tingkat pengawasan serta transparansi bisa mengatasi masalah agensi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sejalan dengan penelitian milik Primadiva, et al., (2021) dan Setiani dan Ismunawan (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

H₄ *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Pada pengujian hipotesis keempat ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, *leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hipotesis keempat didukung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat *leverage* yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki banyak opsi dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan tanpa harus memikirkan biaya yang akan dikeluarkan. Namun, pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengelola dana yang berasal dari hutang. Hal ini dikarenakan apabila tidak digunakan secara efisien maka hal itu akan berdampak buruk dalam jangka Panjang. Dalam teori agensi pemerintah daerah menerima tanggung jawab untuk mengelola keuangan agar lebih efisien dari masyarakat. *Leverage* yang tinggi milik pemerintah daerah dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan stabilitas pada ekonomi daerah. Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik guna menghindari penyalahgunaan dana hutang, sehingga dana dari hutang bisa digunakan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan milik Adinanta dan Efendi (2022) dan Alfi dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

e. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

H₅ PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Pada pengujian hipotesis kelima ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai signifikansi sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hipotesis kelima tidak didukung.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan dikarenakan pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak hanya bergantung PAD, masih banyak pendapatan alternatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dalam teori agensi prinsipal atau masyarakat yang mempercayakan keuangan mereka kepada agen atau pemerintah daerah untuk mampu dalam mengelola keuangan mereka. Namun, jika pemerintah daerah terlalu bergantung pada PAD yang tinggi tanpa harus mencari alternatif pendapatan lain akan mengakibatkan pemerintah akan mengalami fluktuasi pendapatan daerah dan kurang memiliki pendapatan lainnya. Hal ini bisa berakibat fatal

dikarenakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Ginting, et al., (2021) dan Pratama, et al., (2022) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

f. **Pengaruh IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**

Pada pengujian keenam ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai signifikansi sebesar 0,746. Maka dari itu IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam teori agensi masyarakat selaku prinsipal memberikan wewenang kepada agen yaitu pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agen mungkin memiliki kepentingan berbeda dari principal. Mereka akan lebih memprioritaskan kepentingan mereka atau golongan mereka dibandingkan kepentingan masyarakat. Untuk menghindari masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan kualitas regulasi dan penegakan hukum.

TABEL 4.8
REKAPITULASI PENGUJIAN HIPOTESIS

Hipotesis	Keterangan	Uji Hipotesis		
		B	Nilai Sig	Kesimpulan
H1	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	0,994	0,020*	H1 didukung
H2	Jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	-0,022	0,049* [^]	H2 tidak didukung
H3	Tingkat ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	0,107	0,000*	H3 didukung
H4	<i>Leverage</i> berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	0,019	0,000*	H4 didukung
H5	PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	-0,012	0,676	H5 tidak didukung
H6	IPM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	0,014	0,746	-

* lebih kecil dari 0,05. *[^] koefisien variabel beda arah dengan hipotesis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan total aset berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Total aset yang besar dimiliki oleh pemerintah daerah akan membuat pemerintah daerah leluasa dalam menjalankan program-program pemerintahannya tanpa harus mengurangi program yang harus dijalankan. Besarnya total aset menandakan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara efektif untuk memberikan layanan ke masyarakat. Kesimpulan ini dapat dilihat dari signifikansi 0,020 yang lebih kecil dari 0,05.
- b. Jumlah penduduk daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika jumlah penduduk daerah yang meningkat namun tidak disertai dengan meningkatkan pendapatan daerah akan menghambat pemerintah daerah dalam membangun ekonomi dan juga pelayanan publik untuk masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan kemiskinan yang dimiliki dan meningkatnya jumlah tanggung jawab pemerintah daerah untuk masyarakat akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah daerah. Kesimpulan ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari 0,05.
- c. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan

keuangan yang tinggi mengindikasikan pemerintah pusat percaya pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya guna membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa fokus dalam menjalankan program-programnya guna membangun ekonomi dan infrastruktur daerah apabila itu diperlukan. Kesimpulan ini bisa dilihat di nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

- d. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang lebih sehingga cukup untuk dialokasikan ke berbagai proyek yang strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sumber dana yang lebih pemerintah daerah memiliki banyak opsi untuk menjalankan program mereka atau memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Kesimpulan ini bisa dilihat di nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
- e. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD yang rendah memiliki indikasi yang buruk untuk pemerintah daerah. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengelolaan keuangan atau pengawasan keuangan yang baik. Meskipun pemerintah daerah memiliki PAD yang tinggi tetapi tidak disertai dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan yang baik maka kinerja keuangannya bisa

terganggu. Kesimpulan ini bisa dilihat di nilai signifikansi 0,676 lebih besar dari 0,05.

- f. IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. IPM yang tinggi tidak serta merta akan memberikan pengaruh bagi kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi berbagai faktor seperti efisiensi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan. Kesimpulan ini bisa dilihat di nilai signifikansi 0,746 lebih besar dari 0,05.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan cermat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu penulis akui yang menghambat penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini:

- a. Dikarenakan hasil penelitian *Adjust R Square* hanya mampu untuk menjelaskan sebesar 0,092 atau 9,2 persen maka variabel independen belum menjelaskan lebih lanjut dengan variabel dependen.
- b. Buruknya hasil *scan* milik laporan keuangan pemerintah menyebabkan angka yang terdapat di laporan keuangan daerah milik pemerintah menjadi kurang akurat.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan, kesimpulan, dan keterbatasan dalam penelitian yang telah diuraikan, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang:

- a. Penelitian ini menemukan bahwa variabel independen hanya menjelaskan 9,2 persen dari variabel dependen, sedangkan sisanya 90,8 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan variabel potensial lain yang berbeda dengan penelitian ini untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut.
- b. Memperluas cakupan penelitian dengan memperpanjang periode sampel dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti dana perimbangan, umur pemerintahan, dan masa jabatan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2020). Financial leverage and financial performance of oil and gas companies in Nigeria. *Open Journal of Management Science (ISSN: 2734-2107)*, 1(1), 28-44.
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2), 1-14.
- Aladin, A., Sarikadarwati, S., & Safitri, M. D. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Kab/Kota Prov Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Akuntanika*, 7(2), 195-206.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41-54.
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098-1114.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080-1110
- Astuti, S., & Mispriyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49-59.

- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewanti, A. C., Masnila, N., & Aprianti, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi. *Akuntanika*, 8(2), 111-116.
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S & Santosa, A,. (2020). Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(1), 49–58.
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2021). *Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021*. 2017–2022.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50.
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Characteristic and BPK Audit Opinion On The Financial Performance Of District/City Governments In Province Jawa tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55.
- Kurniadi, A. F., & Wardoyo, D. U. (2022). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi:(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 141-150.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541-547.

- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 390-399.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51-55.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 22-34
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Pratama, A. B., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 09(02), 47–57.
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299-310.
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8), 1-20
- Rusmita, S. (2019). Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance. *International Research in Economics and Finance*, 3(2), 29.

- Sari, B. I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Setiani, I. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 261-276.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 26-42.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting (MBIA)*, 19(1), 21-37

LAMPIRAN 1
TOTAL ASET PEMERINTAH DAERAH

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
1	KB ACEH BARAT	28,7 0	28,8 1	28,8 5	28,8 9	28,9 3
2	KB ACEH TIMUR	28,7 7	28,8 1	28,8 2	28,8 5	28,8 5
3	KB ACEH SELATAN	28,6 0	28,6 0	28,6 1	28,7 5	28,8 2
4	KB ACEH UTARA	29,1 8	29,1 7	29,1 8	29,2 2	29,1 5
5	KT SABANG	27,9 0	27,9 2	28,0 2	28,0 1	28,0 5
6	KT BANDA ACEH	29,3 6	29,3 1	29,2 7	29,2 6	29,2 7
7	KT MEDAN	31,1 2	31,1 2	31,1 5	31,1 7	31,1 7
8	KT PEMATANGSIANTAR	28,7 6	28,8 2	28,8 4	28,8 8	29,1 5
9	KT SIBOLGA	28,0 9	28,0 8	28,1 3	28,1 2	28,1 5
10	KT TANJUNG BALAI	28,0 0	27,8 5	27,9 4	27,9 7	28,0 3
11	KT BUKITTINGGI	28,0 0	28,1 1	28,1 6	28,3 5	28,3 5
12	KT PADANG	29,5 9	29,6 9	29,6 5	29,6 9	29,7 7
13	KT PEKANBARU	29,6 3	29,6 5	29,6 8	29,6 9	29,7 3
14	KT JAMBI	28,8 8	28,9 4	29,0 1	29,0 9	29,1 8
15	KT PALEMBANG	30,3 0	30,4 2	30,5 5	30,4 4	30,4 8
16	KT PRABUMULIH	28,5 3	28,5 5	28,6 0	28,6 2	26,6 3
17	KT BENGKULU	28,2 2	28,2 4	28,3 2	28,3 4	28,3 6
18	KT BANDAR LAMPUNG	29,2 1	29,3 1	29,3 2	29,3 5	29,4 9
19	KT METRO	28,6 6	28,7 1	28,6 9	28,6 4	28,6 3

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
20	KT PANGKALPINANG	28,7 3	28,7 5	28,7 6	28,8 1	28,8 7
21	KT BATAM	29,0 9	29,4 4	29,5 0	29,7 1	30,0 3
22	KT TANJUNGPINANG	28,0 9	28,2 4	28,2 2	28,3 1	28,3 5
23	KT BANDUNG	31,3 8	31,4 0	31,4 1	31,4 1	31,5 2
24	KT BEKASI	30,0 6	30,2 3	30,3 0	30,3 5	30,4 0
25	KT BOGOR	29,7 3	29,7 7	29,8 5	29,9 2	29,9 6
26	KT CIREBON	28,8 1	28,9 9	29,0 0	29,0 1	29,0 1
27	KT DEPOK	29,9 5	30,1 2	30,2 8	30,3 9	30,5 3
28	KT SUKABUMI	28,2 0	28,2 1	28,1 5	28,2 1	28,1 8
29	KT TASIKMALAYA	28,8 1	28,9 0	28,9 3	28,9 8	29,0 2
30	KT MAGELANG	28,9 8	29,0 2	29,0 6	29,1 0	29,0 8
31	KT PEKALONGAN	28,5 3	28,6 8	28,7 0	28,7 5	28,8 2
32	KT SALATIGA	28,7 7	28,7 5	28,7 7	28,7 9	28,8 0
33	KT SEMARANG	31,0 6	30,5 3	30,6 8	30,7 0	30,7 4
34	KT SURAKARTA	29,6 8	30,0 9	30,1 3	30,1 7	30,2 2
35	KT TEGAL	28,5 1	28,5 1	28,5 1	28,5 3	28,5 6
36	KT YOGYAKARTA	29,0 4	29,0 8	29,1 4	29,1 8	29,3 8
37	KT BATU	28,2 8	28,3 3	28,3 1	28,3 0	28,6 3
38	KT BLITAR	28,5 2	28,6 0	28,5 8	28,6 8	28,6 7
39	KT KEDIRI	28,7 5	28,7 4	28,7 7	28,8 3	28,8 9
40	KT MADIUN	28,5 6	28,6 1	28,6 4	28,6 7	28,6 7

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
41	KT MALANG	29,4 9	29,4 9	29,5 0	29,7 3	29,7 5
42	KT MOJOKERTO	28,2 5	28,3 1	28,3 3	28,3 4	28,3 8
43	KT PASURUAN	28,7 2	28,7 6	28,7 6	28,8 0	28,8 0
44	KT PROBOLINGGO	28,1 5	28,1 6	28,2 2	28,2 5	28,2 9
45	KT SURABAYA	31,3 9	31,4 3	31,4 6	31,4 8	31,5 8
46	KT CILEGON	29,1 4	29,1 8	29,2 5	29,2 7	29,2 5
47	KT SERANG	28,5 6	28,6 9	28,7 4	28,8 4	28,9 0
48	KT TANGGERANG	29,6 9	29,7 3	29,8 5	30,3 8	30,6 8
49	KT DENPASAR	29,4 3	29,4 6	29,4 7	29,5 1	29,5 2
50	KT BIMA	27,9 8	28,0 4	28,2 8	28,3 0	28,3 7
51	KT MATARAM	28,7 7	28,8 4	28,8 5	28,8 8	28,9 5
52	KT KUPANG	28,2 5	28,7 5	28,7 9	28,6 5	28,7 5
53	KT PONTIANAK	29,6 3	29,7 6	29,7 9	29,8 6	29,9 0
54	KT SINGKAWANG	28,2 4	28,4 0	28,4 0	28,5 0	28,5 3
55	KT BANJARBARU	28,6 2	28,7 1	28,7 4	28,7 5	28,8 3
56	KT BANJARMASIN	29,2 8	29,3 2	29,3 6	29,3 8	29,4 4
57	KT BALIKPAPAN	30,0 4	30,0 9	30,1 2	30,1 5	30,2 1
58	KT BONTANG	29,1 8	29,2 1	29,2 2	29,1 8	29,3 3
59	KT SAMARINDA	30,5 4	30,5 8	30,6 0	30,6 3	30,6 9
60	KT TARAKAN	29,4 1	29,4 4	29,4 3	29,4 2	29,4 3
61	KT BITUNG	28,2 4	28,2 6	28,2 3	28,3 4	28,5 4

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
62	KT KOTAMOBAGU	27,8 1	27,8 3	27,8 2	27,8 4	27,8 6
63	KT MANADO	28,8 1	28,8 3	29,0 0	29,1 8	29,2 7
64	KT TOMOHON	28,1 2	28,1 2	28,1 4	28,2 2	28,2 0
65	KT PALU	28,5 5	28,9 1	28,7 8	28,7 5	28,7 5
66	KT BAUBAU	28,3 7	28,4 9	28,5 2	28,5 6	28,5 8
67	KT KENDARI	29,2 0	29,2 8	29,3 1	29,3 7	29,4 5
68	KT GORONGTALO	28,0 5	28,0 4	28,0 8	28,1 1	28,1 9
69	KT AMBON	28,1 2	28,1 9	28,1 2	28,1 6	28,1 8
70	KT TUAL	27,8 3	27,8 3	27,8 9	28,0 7	28,0 9
71	KT TERNATE	28,4 8	28,5 4	28,5 9	28,6 2	28,6 5
72	KT TIDORE	28,0 4	28,1 1	28,1 9	28,2 7	28,3 5
73	KT SORONG	28,9 5	29,0 6	29,1 0	29,1 0	29,0 6
74	KT JAYAPURA	28,5 9	28,6 2	28,6 5	28,7 1	28,7 7
75	KB PURWAKARTA	28,6 4	28,6 3	28,6 5	28,7 0	28,6 9
76	KB KUBU RAYA	28,3 3	28,3 5	28,3 4	28,4 6	28,4 4
77	KB BENGKAYANG	28,2 6	28,3 2	28,3 5	28,3 3	28,5 3
78	KB KETAPANG	29,1 5	29,2 1	29,2 7	29,3 7	29,4 3
79	KB SAMBAS	28,5 2	28,6 0	28,6 2	28,7 2	28,7 7
80	KB SINTANG	29,0 3	29,0 6	29,0 7	29,1 2	29,2 3

LAMPIRAN 2
JUMLAH PENDUDUK DAERAH

NO	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
1	KB ACEH BARAT	181.302	183.186	185.070	186.954	188.838
2	KB ACEH TIMUR	432.342	437.226	440.029	442.226	444.415
3	KB ACEH SELATAN	225.279	227.502	229.725	231.948	234.171
4	KB ACEH UTARA	378.281	381.355	384.429	387.503	390.577
5	KT SABANG	34.654	35.011	34.879	35.242	35.607
6	KT BANDA ACEH	242.421	246.122	250.811	253.401	255.409
7	KT MEDAN	2.435.022	2.450.236	2.465.450	2.480.664	2.494.512
8	KT PEMATANGSIAN TAR	92.206	93.533	94.895	96.293	97.732
9	KT SIBOLGA	89.867	90.912	91.707	92.431	93.115
10	KT TANJUNG BALAI	169.033	172.201	175.233	178.563	183.636
11	KT BUKITTINGGI	112.334	113.416	114.522	115.649	116.798
12	KT PADANG	909.004	913.445	919.153	925.218	931.610
13	KT PEKANBARU	567.091	588.107	609.829	632.276	655.488
14	KT JAMBI	600.236	611.732	622.490	633.967	646.189
15	KT PALEMBANG	1.663.204	1.680.472	1.704.459	1.720.398	1.737.247
16	KT PRABUMULIH	147.439	149.327	151.280	153.293	155.366
17	KT BENGKULU	372.572	378.281	384.054	390.102	396.417
18	KT BANDAR LAMPUNG	773.218	793.533	813.575	833.752	854.122
19	KT METRO	211.732	215.169	218.922	222.821	226.941
20	KT PANGKALPINANG	210.542	214.873	219.858	225.162	233.272
21	KT BATAM	1.616.152	1.642.527	1.699.370	1.722.064	1.753.552
22	KT TANJUNGPINANG	205.207	209.010	212.839	216.205	219.813
23	KT BANDUNG	2.405.420	2.464.174	2.503.083	2.527.854	2.545.005
24	KT BEKASI	2.966.059	3.067.587	3.183.691	3.273.072	3.362.450

25	KT BOGOR	938.713	942.153	946.693	1.052.359	1.063.740
26	KT CIREBON	316.277	319.312	322.322	323.355	324.652
27	KT DEPOK	1.611.544	1.673.133	1.730.530	2.480.212	2.120.031
28	KT SUKABUMI	340.372	345.423	349.129	351.404	354.349
29	KT TASIKMALAYA	677.337	687.304	700.435	712.975	725.117
30	KT MAGELANG	120.404	121.544	122.681	123.818	125.026
31	KT PEKALONGAN	304.477	307.097	307.150	312.030	309.742
32	KT SALATIGA	194.611	197.779	200.428	193.525	195.131
33	KT SEMARANG	1.753.161	1.768.033	1.783.253	1.798.477	1.813.602
34	KT SURAKARTA	600.162	604.902	609.631	614.522	619.412
35	KT TEGAL	273.825	287.959	273.825	275.781	290.988
36	KT YOGYAKARTA	730.800	738.017	744.466	750.237	756.000
37	KT BATU	209.691	212.021	214.342	214.653	214.653
38	KT BLITAR	144.729	145.631	146.543	147.455	148.367
39	KT KEDIRI	292.768	296.389	301.111	305.543	309.984
40	KT MADIUN	203.601	206.231	208.718	211.647	214.821
41	KT MALANG	843.810	866.118	870.682	866.023	843.810
42	KT MOJOKERTO	132.343	134.776	137.209	140.730	140.730
43	KT PASURUAN	209.700	212.200	214.700	217.200	219.700
44	KT PROBOLINGGO	222.319	226.934	231.543	236.113	240.681
45	KT SURABAYA	2.897.406	2.912.999	2.933.336	2.947.326	2.887.308
46	KT CILEGON	440.319	447.034	453.712	459.627	465.242
47	KT SERANG	612.765	632.573	652.089	671.258	690.437
48	KT TANGGERANG	2.042.572	2.103.752	2.161.723	2.201.733	2.242.401
49	KT DENPASAR	641.680	656.223	670.762	729.644	748.231
50	KT BIMA	148.922	152.021	154.235	156.513	159.107
51	KT MATARAM	436.913	443.657	449.541	455.127	460.711
52	KT KUPANG	336.462	344.952	353.649	362.239	370.829
53	KT PONTIANAK	637.723	646.661	650.333	661.030	673.400
54	KT SINGKAWANG	236.395	238.514	240.633	242.752	241.467
55	KT BANJARBARU	224.105	230.272	234.862	240.349	246.223

56	KT BANJARMASIN	622.476	633.963	657.663	662.230	666.795
57	KT BALIKPAPAN	693.821	700.733	708.864	717.127	725.467
58	KT BONTANG	168.664	173.054	178.917	183.124	186.137
59	KT SAMARINDA	805.873	817.470	825.494	840.270	857.359
60	KT TARAKAN	249.891	254.252	234.632	240.249	243.769
61	KT BITUNG	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
62	KT KOTAMOBAGU	112.276	125.835	127.711	129.427	131.140
63	KT MANADO	430.293	441.915	451.916	461.512	471.108
64	KT TOMOHON	97.812	99.631	100.853	101.151	101.151
65	KT PALU	360.612	365.072	369.534	377.030	384.534
66	KT BAUBAU	167.519	157.911	159.248	161.354	163.963
67	KT KENDARI	86.740	93.761	104.401	107.164	110.874
68	KT GORONGTALO	143.441	146.143	148.840	151.345	153.649
69	KT AMBON	362.320	366.532	370.744	374.956	379.168
70	KT TUAL	87.542	88.633	89.346	90.059	90.772
71	KT TERNATE	223.111	224.423	225.213	226.418	227.325
72	KT TIDORE	106.327	107.475	108.623	109.771	111.000
73	KT SORONG	229.384	235.204	241.024	246.844	252.664
74	KT JAYAPURA	420.964	422.083	404.295	363.143	403.118
75	KB PURWAKARTA	924.242	938.506	952.763	967.019	981.271
76	KB KUBU RAYA	604.563	622.258	639.937	657.811	676.103
77	KB BENGKAYANG	286.472	288.141	289.810	291.479	290.588
78	KB KETAPANG	603.131	611.604	620.031	628.402	636.790
79	KB SAMBAS	323.161	327.262	331.337	335.412	339.487
80	KB SINTANG	402.223	407.433	412.643	417.853	423.063

LAMPIRAN 3
TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
1	KB ACEH BARAT	0,45	0,42	0,42	0,41	0,41
2	KB ACEH TIMUR	0,49	0,42	0,42	0,42	0,43
3	KB ACEH SELATAN	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43
4	KB ACEH UTARA	0,37	0,34	0,35	0,36	0,36
5	KT SABANG	0,56	0,56	0,51	0,54	0,56
6	KT BANDA ACEH	0,56	0,50	0,43	0,45	0,39
7	KT MEDAN	0,30	0,30	0,36	0,30	0,28
8	KT PEMATANGSIANTAR	0,57	0,61	0,64	0,62	0,59
9	KT SIBOLGA	0,65	0,69	0,63	0,65	0,65
10	KT TANJUNG BALAI	0,66	0,69	0,67	0,66	0,67
11	KT BUKITTINGGI	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60
12	KT PADANG	0,47	0,50	0,49	0,47	0,46
13	KT PEKANBARU	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32
14	KT JAMBI	0,44	0,45	0,42	0,41	0,40
15	KT PALEMBANG	0,36	0,34	0,33	0,33	0,29
16	KT PRABUMULIH	0,43	0,36	0,41	0,39	0,39
17	KT BENGKULU	0,61	0,61	0,60	0,55	0,54
18	KT BANDAR LAMPUNG	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46
19	KT METRO	0,51	0,51	0,47	0,46	0,47
20	KT PANGKALPINANG	0,48	0,52	0,51	0,45	0,42
21	KT BATAM	0,25	0,26	0,24	0,25	0,22
22	KT TANJUNGPINANG	0,50	0,49	0,45	0,49	0,43
23	KT BANDUNG	0,28	0,28	0,28	0,27	0,24
24	KT BEKASI	0,25	0,21	0,23	0,20	0,19
25	KT BOGOR	0,34	0,33	0,31	0,28	0,27
26	KT CIREBON	0,41	0,38	0,33	0,40	0,36
27	KT DEPOK	0,29	0,29	0,28	0,25	0,22
28	KT SUKABUMI	0,41	0,42	0,40	0,37	0,38
29	KT TASIKMALAYA	0,42	0,43	0,43	0,37	0,39
30	KT MAGELANG	0,48	0,47	0,44	0,41	0,41
31	KT PEKALONGAN	0,50	0,49	0,45	0,44	0,43
32	KT SALATIGA	0,50	0,51	0,48	0,44	0,45
33	KT SEMARANG	0,28	0,29	0,27	0,24	0,23
34	KT SURAKARTA	0,44	0,45	0,43	0,40	0,38
35	KT TEGAL	0,49	0,49	0,45	0,44	0,59
36	KT YOGYAKARTA	0,38	0,40	0,37	0,36	0,48

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
37	KT BATU	0,48	0,50	0,51	0,46	0,44
38	KT BLITAR	0,47	0,47	0,46	0,38	0,43
39	KT KEDIRI	0,47	0,48	0,45	0,38	0,39
40	KT MADIUN	0,50	0,63	0,45	0,42	0,44
41	KT MALANG	0,41	0,41	0,41	0,37	0,36
42	KT MOJOKERTO	0,43	0,47	0,42	0,38	0,40
43	KT PASURUAN	0,47	0,49	0,50	0,48	0,44
44	KT PROBOLINGGO	0,47	0,50	0,48	0,43	0,45
45	KT SURABAYA	0,15	0,14	0,16	0,14	0,13
46	KT CILEGON	0,37	0,36	0,32	0,33	0,32
47	KT SERANG	0,51	0,50	0,48	0,41	0,43
48	KT TANGGERANG	0,22	0,23	0,23	0,20	0,19
49	KT DENPASAR	0,31	0,31	0,32	0,31	0,29
50	KT BIMA	0,65	0,63	0,61	0,59	0,59
51	KT MATARAM	0,42	0,43	0,41	0,40	0,38
52	KT KUPANG	0,55	0,58	0,55	0,56	0,57
53	KT PONTIANAK	0,42	0,41	0,43	0,41	0,38
54	KT SINGKAWANG	0,69	0,72	0,56	0,52	0,48
55	KT BANJARBARU	0,39	0,40	0,35	0,37	0,29
56	KT BANJARMASIN	0,44	0,44	0,40	0,42	0,33
57	KT BALIKPAPAN	0,18	0,18	0,17	0,19	0,15
58	KT BONTANG	0,17	0,15	0,15	0,19	0,12
59	KT SAMARINDA	0,24	0,21	0,23	0,23	0,18
60	KT TARAKAN	0,43	0,45	0,46	0,40	0,38
61	KT BITUNG	0,49	0,59	0,63	0,49	0,48
62	KT KOTAMOBAGU	0,52	0,57	0,56	0,56	0,55
63	KT MANADO	0,50	0,51	0,53	0,52	0,46
64	KT TOMOHON	0,61	0,70	0,60	0,59	0,64
65	KT PALU	0,51	0,32	0,50	0,46	0,46
66	KT BAUBAU	0,62	0,61	0,59	0,57	0,54
67	KT KENDARI	0,54	0,54	0,51	0,45	0,42
68	KT GORONGTALO	0,54	0,54	0,53	0,47	0,47
69	KT AMBON	0,59	0,58	0,55	0,54	0,55
70	KT TUAL	0,67	0,71	0,65	0,51	0,58
71	KT TERNATE	1,10	0,67	0,63	0,61	0,60
72	KT TIDORE	0,63	0,62	0,57	0,56	0,53
73	KT SORONG	0,50	0,44	0,42	0,47	0,42
74	KT JAYAPURA	0,50	0,51	0,46	0,45	0,40
75	KB PURWAKARTA	0,41	0,41	0,37	0,33	0,35

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
76	KB KUBU RAYA	0,50	0,53	0,49	0,46	0,46
77	KB BENGKAYANG	0,58	0,54	0,54	0,51	0,51
78	KB KETAPANG	0,52	0,48	0,46	0,39	0,44
79	KB SAMBAS	0,51	0,49	0,49	0,51	0,47
80	KB SINTANG	0,46	0,47	0,45	0,42	0,47

**LAMPIRAN 4
LEVERAGE**

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
1	KB ACEH BARAT	0,01 5	0,01 5	0,01 5	0,01 7	0,01 5
2	KB ACEH TIMUR	0,04 3	0,04 0	0,03 6	0,03 7	0,03 9
3	KB ACEH SELATAN	0,01 2	0,00 6	0,00 9	0,01 1	0,01 6
4	KB ACEH UTARA	0,01 5	0,01 5	0,01 1	0,00 7	0,00 9
5	KT SABANG	0,00 8	0,00 3	0,00 4	0,00 1	0,01 7
6	KT BANDA ACEH	0,01 1	0,01 3	0,03 1	0,03 4	0,03 0
7	KT MEDAN	0,01 0	0,00 4	0,00 3	0,00 3	0,00 3
8	KT PEMATANGSIANTAR	0,01 0	0,00 9	0,00 9	0,00 7	0,00 9
9	KT SIBOLGA	0,00 3	0,00 2	0,00 4	0,00 5	0,06 2
10	KT TANJUNG BALAI	0,00 8	0,00 9	0,00 1	0,00 1	0,00 7
11	KT BUKITTINGGI	0,00 5	0,00 2	0,00 2	0,00 6	0,00 6
12	KT PADANG	0,00 8	0,00 4	0,00 4	0,00 5	0,00 8
13	KT PEKANBARU	0,03 5	0,04 3	0,04 0	0,03 2	0,02 3
14	KT JAMBI	0,01 3	0,01 0	0,01 2	0,03 3	0,02 5
15	KT PALEMBANG	0,02 4	0,01 9	0,01 6	0,02 2	0,01 5
16	KT PRABUMULIH	0,01 1	0,00 9	0,00 9	0,02 5	0,00 8
17	KT BENGKULU	0,00 6	0,01 3	0,09 4	0,07 1	0,04 3
18	KT BANDAR LAMPUNG	0,10 2	0,12 3	0,20 0	0,14 5	0,08 7
19	KT METRO	0,00 9	0,01 6	0,01 7	0,01 9	0,02 1
20	KT PANGKALPINANG	0,00 2	0,00 5	0,00 3	0,00 5	0,00 4

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
21	KT BATAM	0,02 0	0,01 7	0,00 3	0,00 5	0,00 3
22	KT TANJUNGPINANG	0,00 3	0,00 5	0,00 2	0,00 3	0,00 1
23	KT BANDUNG	0,00 7	0,00 5	0,00 4	0,00 4	0,00 3
24	KT BEKASI	0,05 2	0,01 5	0,00 9	0,00 7	0,00 7
25	KT BOGOR	0,01 4	0,01 4	0,01 2	0,01 7	0,01 3
26	KT CIREBON	0,01 8	0,02 1	0,01 1	0,01 5	0,02 4
27	KT DEPOK	0,00 2	0,00 4	0,00 3	0,00 8	0,00 2
28	KT SUKABUMI	0,01 1	0,01 5	0,01 4	0,00 9	0,01 4
29	KT TASIKMALAYA	0,03 3	0,03 9	0,02 3	0,00 9	0,02 9
30	KT MAGELANG	0,00 1	0,00 0	0,00 1	0,00 1	0,00 1
31	KT PEKALONGAN	0,00 6	0,00 9	0,00 6	0,00 7	0,00 3
32	KT SALATIGA	0,00 8	0,00 6	0,01 1	0,01 0	0,00 6
33	KT SEMARANG	0,00 3	0,00 4	0,00 5	0,00 5	0,00 3
34	KT SURAKARTA	0,00 5	0,00 5	0,00 7	0,00 4	0,00 3
35	KT TEGAL	0,02 0	0,01 4	0,01 9	0,02 7	0,01 2
36	KT YOGYAKARTA	0,00 4	0,00 3	0,00 2	0,00 3	0,00 2
37	KT BATU	0,00 7	0,00 4	0,00 5	0,00 3	0,00 5
38	KT BLITAR	0,00 9	0,00 7	0,01 2	0,02 0	0,01 0
39	KT KEDIRI	0,00 7	0,00 5	0,00 6	0,02 1	0,00 6
40	KT MADIUN	0,00 6	0,00 6	0,00 5	0,00 5	0,00 5
41	KT MALANG	0,00 2	0,00 2	0,00 2	0,00 3	0,00 5

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
42	KT MOJOKERTO	0,01 2	0,01 9	0,01 3	0,00 8	0,00 6
43	KT PASURUAN	0,00 3	0,00 8	0,00 3	0,00 1	0,00 3
44	KT PROBOLINGGO	0,00 8	0,00 4	0,01 0	0,00 7	0,00 9
45	KT SURABAYA	0,01 3	0,01 5	0,01 4	0,01 6	0,01 4
46	KT CILEGON	0,00 5	0,00 7	0,00 5	0,01 0	0,00 2
47	KT SERANG	0,00 5	0,00 6	0,00 5	0,00 8	0,01 1
48	KT TANGGERANG	0,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00 1	0,00 2
49	KT DENPASAR	0,00 4	0,00 5	0,00 4	0,00 8	0,00 3
50	KT BIMA	0,00 1	0,00 4	0,00 1	0,00 0	0,00 0
51	KT MATARAM	0,01 7	0,02 2	0,02 1	0,02 4	0,02 3
52	KT KUPANG	0,00 1	0,00 0	0,01 1	0,00 7	0,00 2
53	KT PONTIANAK	0,00 3	0,00 4	0,00 5	0,02 2	0,01 0
54	KT SINGKAWANG	0,02 5	0,01 8	0,01 5	0,11 2	0,11 2
55	KT BANJARBARU	0,04 0	0,02 8	0,05 4	0,04 3	0,01 8
56	KT BANJARMASIN	0,01 4	0,00 7	0,01 2	0,00 7	0,00 7
57	KT BALIKPAPAN	0,00 4	0,00 4	0,00 3	0,00 7	0,00 3
58	KT BONTANG	0,00 5	0,00 6	0,00 9	0,00 7	0,00 4
59	KT SAMARINDA	0,01 2	0,01 0	0,01 1	0,01 3	0,00 9
60	KT TARAKAN	0,04 9	0,05 6	0,05 6	0,06 8	0,05 7
61	KT BITUNG	0,00 1	0,00 2	0,01 8	0,04 4	0,11 5
62	KT KOTAMOBAGU	0,02 4	0,02 4	0,01 6	0,01 3	0,01 3

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
63	KT MANADO	0,01 1	0,02 8	0,05 2	0,04 1	0,07 4
64	KT TOMOHON	0,00 4	0,01 3	0,01 2	0,05 8	0,02 3
65	KT PALU	0,02 3	0,01 5	0,01 4	0,01 7	0,03 2
66	KT BAUBAU	0,01 1	0,00 9	0,00 5	0,00 6	0,03 4
67	KT KENDARI	0,02 8	0,05 0	0,03 1	0,04 3	0,08 9
68	KT GORONGTALO	0,05 6	0,05 8	0,06 3	0,08 9	0,22 1
69	KT AMBON	0,03 4	0,07 9	0,10 7	0,10 4	0,07 4
70	KT TUAL	0,01 5	0,00 1	0,01 0	0,00 9	0,00 6
71	KT TERNATE	0,01 2	0,01 5	0,01 6	0,00 2	0,00 2
72	KT TIDORE	0,00 2	0,00 2	0,00 3	0,00 5	0,00 5
73	KT SORONG	0,08 3	0,06 2	0,08 2	0,10 4	0,04 3
74	KT JAYAPURA	0,00 1	0,00 4	0,00 3	0,00 4	0,00 2
75	KB PURWAKARTA	0,04 8	0,03 5	0,03 7	0,03 7	0,03 4
76	KB KUBU RAYA	0,00 8	0,00 3	0,00 1	0,04 0	0,06 6
77	KB BENGKAYANG	0,03 0	0,00 6	0,01 0	0,03 0	0,14 2
78	KB KETAPANG	0,03 0	0,01 8	0,02 2	0,01 3	0,01 2
79	KB SAMBAS	0,05 3	0,04 8	0,05 2	0,07 1	0,12 3
80	KB SINTANG	0,00 7	0,00 8	0,00 7	0,01 0	0,00 4

LAMPIRAN 5
PAD

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	2022
1	KB ACEH BARAT	0,98	0,97	0,97	0,90	0,98
2	KB ACEH TIMUR	1,07	1,09	1,07	0,62	1,25
3	KB ACEH SELATAN	1,18	0,84	0,96	0,98	1,24
4	KB ACEH UTARA	1,14	1,21	0,81	0,79	1,07
5	KT SABANG	1,04	1,04	1,05	0,93	0,93
6	KT BANDA ACEH	0,87	1,00	0,97	0,99	1,40
7	KT MEDAN	1,21	0,87	0,83	1,26	1,17
8	KT PEMATANGSIANTAR	1,32	0,90	1,12	0,92	1,20
9	KT SIBOLGA	0,78	0,85	1,15	0,96	1,08
10	KT TANJUNG BALAI	1,14	0,86	1,00	0,92	1,04
11	KT BUKITTINGGI	1,00	1,10	0,75	1,09	1,43
12	KT PADANG	0,89	1,12	0,92	1,17	1,05
13	KT PEKANBARU	0,85	1,20	0,87	1,11	1,17
14	KT JAMBI	0,85	1,16	0,90	1,08	1,14
15	KT PALEMBANG	0,87	1,13	0,96	1,12	1,22
16	KT PRABUMULIH	0,76	1,11	0,84	0,95	10,8 3
17	KT BENGKULU	1,07	1,00	0,85	1,13	1,14
18	KT BANDAR LAMPUNG	0,90	1,14	0,86	1,05	1,14
19	KT METRO	0,99	1,28	1,26	1,24	0,88
20	KT PANGKALPINANG	0,96	0,93	0,91	1,20	1,20
21	KT BATAM	1,11	1,06	0,85	1,12	1,17
22	KT TANJUNGPINANG	0,99	0,93	0,98	0,93	1,33
23	KT BANDUNG	1,00	0,99	0,81	1,06	1,26
24	KT BEKASI	1,01	1,22	0,84	1,24	1,02
25	KT BOGOR	0,93	1,11	0,86	0,72	1,84
26	KT CIREBON	0,99	0,99	1,01	0,92	1,35
27	KT DEPOK	0,88	1,22	0,94	1,27	1,07
28	KT SUKABUMI	1,01	0,91	1,04	1,00	1,05
29	KT TASIKMALAYA	0,79	1,04	1,08	1,42	0,77
30	KT MAGELANG	1,07	1,09	1,06	1,10	1,18
31	KT PEKALONGAN	0,93	1,19	1,08	1,10	1,05
32	KT SALATIGA	0,95	1,13	0,93	1,28	0,86
33	KT SEMARANG	1,02	1,13	0,99	1,17	1,07
34	KT SURAKARTA	1,00	1,04	0,90	1,14	1,15

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	2022
35	KT TEGAL	0,90	1,04	0,93	1,16	1,10
36	KT YOGYAKARTA	1,02	1,03	0,82	1,06	1,21
37	KT BATU	1,09	1,13	0,74	1,07	1,38
38	KT BLITAR	0,84	1,02	1,05	1,70	0,53
39	KT KEDIRI	0,85	1,07	0,99	1,67	0,73
40	KT MADIUN	1,00	1,09	0,99	1,07	0,99
41	KT MALANG	0,95	1,06	0,84	1,23	1,19
42	KT MOJOKERTO	1,02	1,06	1,20	1,11	0,91
43	KT PASURUAN	1,03	1,06	0,90	0,91	1,24
44	KT PROBOLINGGO	0,86	1,00	1,04	1,16	0,90
45	KT SURABAYA	0,96	1,08	0,80	1,10	1,12
46	KT CILEGON	0,89	1,10	1,13	0,88	1,21
47	KT SERANG	0,71	1,16	0,95	1,14	1,25
48	KT TANGGERANG	0,94	1,11	0,80	1,13	1,08
49	KT DENPASAR	0,93	1,08	0,72	1,08	1,12
50	KT BIMA	0,88	1,09	0,94	0,99	1,22
51	KT MATARAM	0,93	1,04	0,97	1,08	1,14
52	KT KUPANG	0,75	1,08	0,90	0,99	1,12
53	KT PONTIANAK	0,93	1,09	0,84	1,03	1,30
54	KT SINGKAWANG	0,99	1,27	0,93	1,14	1,22
55	KT BANJARBARU	1,00	1,17	0,91	1,31	0,92
56	KT BANJARMASIN	0,86	1,19	0,90	1,18	1,13
57	KT BALIKPAPAN	1,06	1,18	0,80	1,24	1,07
58	KT BONTANG	1,18	1,10	0,91	1,23	0,94
59	KT SAMARINDA	0,96	1,12	0,87	1,18	1,30
60	KT TARAKAN	1,08	1,01	1,47	1,39	0,95
61	KT BITUNG	0,89	0,80	0,80	1,30	1,09
62	KT KOTAMOBAGU	0,90	1,00	1,14	1,25	1,05
63	KT MANADO	0,97	1,04	0,69	1,06	1,27
64	KT TOMOHON	1,03	1,18	0,89	1,61	0,83
65	KT PALU	0,94	0,88	1,10	1,31	0,87
66	KT BAUBAU	0,63	1,28	1,01	1,10	1,12
67	KT KENDARI	0,81	1,22	1,03	1,34	1,13
68	KT GORONGTALO	0,93	1,12	0,98	1,39	0,76
69	KT AMBON	1,11	1,05	0,81	1,17	1,16
70	KT TUAL	0,65	1,09	0,94	1,26	0,96
71	KT TERNATE	1,03	1,10	0,74	1,11	1,09
72	KT TIDORE	1,13	1,17	1,20	0,76	0,90
73	KT SORONG	0,68	1,03	1,02	1,39	0,61

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	2022
74	KT JAYAPURA	1,38	0,96	0,74	1,44	1,20
75	KB PURWAKARTA	0,78	1,14	1,02	1,20	1,09
76	KB KUBU RAYA	1,21	0,94	0,87	1,07	1,07
77	KB BENGKAYANG	1,11	1,03	1,05	1,15	1,33
78	KB KETAPANG	1,13	1,04	1,17	1,26	0,77
79	KB SAMBAS	0,64	1,17	0,87	1,14	1,13
80	KB SINTANG	2,13	0,72	0,78	1,31	0,92

LAMPIRAN 6
INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
1	KB ACEH BARAT	69,2 6	70,2 0	71,2 2	71,3 8	72,3 4
2	KB ACEH TIMUR	67,6 3	68,0 7	68,8 3	69,7 4	69,0 8
3	KB ACEH SELATAN	68,2 7	69,2 1	70,2 5	67,8 7	67,8 7
4	KB ACEH UTARA	69,7 0	70,2 2	70,5 9	70,9 0	68,4 7
5	KT SABANG	72,5 1	73,0 8	73,6 5	74,2 2	71,9 9
6	KT BANDA ACEH	84,3 7	85,0 7	85,3 0	85,5 3	86,2 8
7	KT MEDAN	79,9 0	80,7 2	81,2 1	81,7 6	81,7 6
8	KT PEMATANGSIANTAR	74,0 3	74,6 9	75,1 5	75,6 1	79,7 0
9	KT SIBOLGA	69,7 9	70,5 4	71,0 9	71,5 3	74,6 8
10	KT TANJUNG BALAI	70,7 2	71,2 5	71,6 1	72,2 4	72,9 1
11	KT BUKITTINGGI	80,1 7	80,7 7	81,2 1	81,5 8	81,4 2
12	KT PADANG	82,2 5	82,6 8	82,8 2	82,9 0	83,2 6
13	KT PEKANBARU	81,3 2	81,5 8	81,8 4	82,0 6	82,0 6
14	KT JAMBI	70,6 5	71,2 6	71,6 3	72,3 4	72,4 3
15	KT PALEMBANG	78,7 2	79,0 9	78,3 3	79,4 7	79,5
16	KT PRABUMULIH	73,1 0	73,7 2	74,1 5	74,6 7	70,8 7
17	KT BENGKULU	70,6 4	71,2 1	71,6 0	72,0 1	72,1 0
18	KT BANDAR LAMPUNG	76,9 3	77,5 8	77,8 9	78,0 1	73,9 3
19	KT METRO	76,2 2	76,7 7	77,1 9	77,4 9	77,8 9

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
20	KT PANGKALPINANG	77,4 3	77,9 7	78,2 2	78,5 7	79,2 4
21	KT BATAM	80,5 4	81,1 6	81,6 4	82,0 9	81,6 7
22	KT TANJUNGPINANG	75,4 8	75,7 9	75,9 3	78,9 3	78,4 7
23	KT BANDUNG	81,0 6	81,6 2	81,8 6	82,0 8	82,5 2
24	KT BEKASI	81,3 8	81,6 9	81,9 5	82,4 6	82,4 6
25	KT BOGOR	76,8 3	77,2 4	76,1 1	77,2 1	77,6 8
26	KT CIREBON	74,1 8	74,5 7	74,8 9	75,2 5	75,8 9
27	KT DEPOK	79,7 9	80,4 6	80,9 0	81,2 6	81,2 6
28	KT SUKABUMI	73,0 5	73,6 7	74,2 9	74,9 1	75,4 0
29	KT TASIKMALAYA	65,0 0	65,6 4	65,6 7	65,9 0	73,8 7
30	KT MAGELANG	77,9 7	78,3 4	78,8 9	79,2 5	80,3 9
31	KT PEKALONGAN	74,4 7	75,2 2	75,9 7	76,7 2	74,4 4
32	KT SALATIGA	83,1 4	83,5 2	83,8 9	84,2 6	84,3 5
33	KT SEMARANG	83,9 5	84,3 1	84,6 7	85,0 3	84,0 8
34	KT SURAKARTA	82,4 7	82,9 1	83,2 4	83,5 4	83,0 8
35	KT TEGAL	74,9 3	75,0 7	75,5 2	75,9 0	74,7 7
36	KT YOGYAKARTA	81,1 8	81,5 8	81,9 8	81,3 8	87,7 2
37	KT BATU	76,2 7	76,6 7	77,0 6	77,4 5	80,7 6
38	KT BLITAR	74,4 1	74,7 1	75,0 1	75,3 1	76,3 6
39	KT KEDIRI	77,5 8	78,0 8	78,2 3	79,5 9	78,9 4
40	KT MADIUN	78,8 4	79,4 4	80,2 7	81,2 1	82,0 1

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
41	KT MALANG	80,8 9	81,4 5	81,9 8	82,0 4	82,7 1
42	KT MOJOKERTO	72,3 3	72,7 4	73,1 4	73,5 8	74,0 1
43	KT PASURUAN	74,3 8	74,5 6	74,8 2	75,0 3	75,2 6
44	KT PROBOLINGGO	74,5 5	74,8 0	75,0 4	75,2 8	75,5 2
45	KT SURABAYA	81,7 4	82,2 2	82,2 3	82,3 1	82,7 4
46	KT CILEGON	72,0 1	72,3 7	72,7 3	73,0 9	73,4 5
47	KT SERANG	71,1 4	71,6 2	72,0 1	72,4 4	72,9 8
48	KT TANGGERANG	77,9 2	78,4 3	78,2 5	78,5 0	78,9 0
49	KT DENPASAR	82,7 7	83,1 3	83,4 5	83,7 8	84,3 7
50	KT BIMA	71,5 7	72,0 4	72,4 9	73,0 6	73,6 2
51	KT MATARAM	78,1 3	79,1 0	78,9 1	79,2 4	79,5 9
52	KT KUPANG	78,7 1	79,5 5	79,7 9	80,0 1	80,2 3
53	KT PONTIANAK	78,8 4	79,3 1	79,4 4	79,9 3	80,4 8
54	KT SINGKAWANG	70,4 4	71,0 8	71,7 2	72,1 1	72,8 9
55	KT BANJARBARU	78,5 1	79,0 3	79,5 7	80,4 1	80,8 2
56	KT BANJARMASIN	74,4 1	74,4 7	74,9 8	75,2 7	75,5 6
57	KT BALIKPAPAN	78,0 2	78,8 6	79,3 4	79,9 9	80,6 5
58	KT BONTANG	79,4 7	80,0 2	80,0 9	80,5 9	80,9 4
59	KT SAMARINDA	75,3 7	76,0 0	76,3 3	76,8 8	77,4 4
60	KT TARAKAN	75,6 9	76,0 9	76,7 2	77,3 4	78,0 1
61	KT BITUNG	72,8 7	73,2 0	73,5 3	73,8 5	74,1 8

N O	NAMA PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
62	KT KOTAMOBAGU	70,8 1	71,3 4	72,0 2	72,7 3	73,4 7
63	KT MANADO	77,4 6	78,0 5	78,5 6	79,0 4	79,6 6
64	KT TOMOHON	77,8 4	78,0 7	78,2 7	78,4 8	78,6 9
65	KT PALU	79,8 1	80,3 7	80,8 8	81,7 0	82,0 2
66	KT BAUBAU	70,6 4	71,0 2	71,4 0	72,0 1	72,7 4
67	KT KENDARI	77,5 6	78,4 4	79,2 5	80,0 7	80,0 9
68	KT GORONGTALO	75,4 1	76,2 1	76,7 4	77,4 1	78,2 2
69	KT AMBON	79,4 5	79,9 3	79,9 5	80,2 0	80,4 5
70	KT TUAL	67,4 0	67,7 4	67,9 6	68,1 6	68,6 0
71	KT TERNATE	80,1 2	80,5 6	80,8 9	81,2 3	81,5 7
72	KT TIDORE	67,7 6	68,4 3	69,1 1	70,9 9	71,5 5
73	KT SORONG	76,5 4	76,8 2	77,0 9	77,7 7	78,9 8
74	KT JAYAPURA	68,2 7	68,7 6	69,2 4	69,7 2	70,2 0
75	KB PURWAKARTA	68,7 7	69,1 8	69,5 9	70,0 1	70,4 4
76	KB KUBU RAYA	67,2 3	68,1 0	68,5 6	68,1 6	68,9 1
77	KB BENGKAYANG	66,4 2	67,0 1	67,5 4	68,0 8	68,7 8
78	KB KETAPANG	66,4 1	67,1 6	67,1 7	67,4 3	67,7 0
79	KB SAMBAS	66,3 8	66,7 3	67,1 0	67,1 0	67,9 5
80	KB SINTANG	67,4 3	68,1 8	68,8 7	69,5 4	70,2 3

LAMPIRAN 7
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
1	KB ACEH BARAT	0,78	0,83	0,82	0,67	0,60
2	KB ACEH TIMUR	0,74	0,76	0,88	0,93	0,98
3	KB ACEH SELATAN	0,72	0,82	0,89	0,76	0,80
4	KB ACEH UTARA	0,67	0,95	0,86	0,90	1,14
5	KT SABANG	0,89	0,80	0,76	0,88	0,96
6	KT BANDA ACEH	1,00	0,91	0,85	0,77	0,75
7	KT MEDAN	0,90	0,95	0,94	0,92	1,05
8	KT PEMATANGSIANTAR	0,86	0,85	0,96	1,01	1,12
9	KT SIBOLGA	0,95	0,88	0,88	0,84	0,93
10	KT TANJUNG BALAI	0,98	0,94	0,98	0,95	0,93
11	KT BUKITTINGGI	0,83	0,81	0,88	0,66	1,02
12	KT PADANG	0,95	0,75	1,14	0,94	0,91
13	KT PEKANBARU	0,94	0,88	0,98	0,99	1,00
14	KT JAMBI	0,76	0,84	0,87	0,86	0,90
15	KT PALEMBANG	0,85	0,83	0,84	0,82	0,77
16	KT PRABUMULIH	0,88	0,95	0,96	0,93	0,93
17	KT BENGKULU	1,15	0,87	0,97	0,87	0,94
18	KT BANDAR LAMPUNG	0,86	0,88	1,02	0,77	0,92
19	KT METRO	0,86	0,88	1,03	1,02	1,05
20	KT PANGKALPINANG	0,82	0,93	0,94	0,85	0,71
21	KT BATAM	0,83	0,52	0,99	0,82	0,82
22	KT TANJUNGPINANG	0,90	0,13	1,02	1,03	0,86
23	KT BANDUNG	0,92	0,89	0,95	0,94	0,98
24	KT BEKASI	1,04	0,68	0,82	0,86	0,89
25	KT BOGOR	0,93	0,85	0,76	0,80	0,99
26	KT CIREBON	1,02	0,93	0,91	0,97	1,06
27	KT DEPOK	0,35	0,63	0,60	0,70	0,58
28	KT SUKABUMI	0,90	0,91	0,94	0,86	1,06
29	KT TASIKMALAYA	0,94	0,94	0,90	0,78	0,81
30	KT MAGELANG	0,88	0,86	0,83	0,84	0,97
31	KT PEKALONGAN	0,87	0,89	0,93	0,85	0,80
32	KT SALATIGA	0,91	0,92	0,99	0,98	1,02
33	KT SEMARANG	0,86	0,84	0,89	0,90	0,81
34	KT SURAKARTA	0,84	0,85	0,86	0,82	0,82
35	KT TEGAL	0,91	0,94	1,02	0,97	0,84

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
36	KT YOGYAKARTA	0,84	0,88	0,80	0,79	0,79
37	KT BATU	0,83	0,82	0,99	0,90	0,97
38	KT BLITAR	0,84	0,83	1,03	0,79	0,92
39	KT KEDIRI	0,98	0,95	0,84	0,86	0,86
40	KT MADIUN	0,88	0,89	0,92	0,91	1,03
41	KT MALANG	1,08	0,86	0,96	0,97	0,95
42	KT MOJOKERTO	0,94	0,93	0,95	0,99	1,02
43	KT PASURUAN	1,23	0,87	1,05	0,96	1,00
44	KT PROBOLINGGO	0,91	0,95	0,91	0,90	0,93
45	KT SURABAYA	0,79	0,74	0,89	0,91	0,86
46	KT CILEGON	0,54	0,89	0,82	0,91	1,00
47	KT SERANG	0,84	0,78	0,93	0,82	0,89
48	KT TANGGERANG	0,93	0,86	0,85	0,94	0,96
49	KT DENPASAR	0,82	0,90	0,93	0,96	0,87
50	KT BIMA	0,92	0,91	0,99	0,80	0,69
51	KT MATARAM	0,86	0,87	0,88	0,82	0,85
52	KT KUPANG	0,87	0,94	0,93	0,95	0,84
53	KT PONTIANAK	0,84	0,79	1,00	0,94	0,92
54	KT SINGKAWANG	0,83	0,84	0,95	0,98	0,94
55	KT BANJARBARU	0,85	0,84	0,88	0,98	0,84
56	KT BANJARMASIN	0,78	0,85	0,91	0,97	0,71
57	KT BALIKPAPAN	0,82	0,92	0,84	0,93	0,57
58	KT BONTANG	0,87	0,90	0,82	1,13	0,64
59	KT SAMARINDA	0,81	0,76	0,89	0,98	0,73
60	KT TARAKAN	0,86	0,86	1,06	0,98	0,76
61	KT BITUNG	0,87	0,94	1,11	0,82	0,88
62	KT KOTAMOBAGU	0,82	0,89	0,96	0,96	0,97
63	KT MANADO	0,97	1,00	1,14	0,96	0,83
64	KT TOMOHON	0,91	1,00	0,93	0,90	1,08
65	KT PALU	0,87	0,52	1,28	1,09	0,98
66	KT BAUBAU	0,86	0,87	0,96	0,88	0,87
67	KT KENDARI	0,74	1,00	0,87	0,65	0,68
68	KT GORONGTALO	1,00	1,00	1,06	0,85	0,93
69	KT AMBON	0,97	0,94	0,96	0,99	0,11
70	KT TUAL	0,95	0,80	0,78	0,60	0,93
71	KT TERNATE	0,93	0,87	0,85	0,87	0,91
72	KT TIDORE	0,93	0,80	0,75	0,85	0,82
73	KT SORONG	1,23	0,90	1,15	1,06	0,64
74	KT JAYAPURA	0,83	0,84	0,82	0,86	0,87

N O	NAMA PEMDA	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
75	KB PURWAKARTA	0,79	0,85	0,91	0,87	0,97
76	KB KUBU RAYA	0,81	0,95	0,92	0,90	0,90
77	KB BENGKAYANG	0,90	0,76	0,93	0,93	0,94
78	KB KETAPANG	0,86	0,77	0,76	0,72	0,78
79	KB SAMBAS	0,84	0,72	0,90	0,72	1,02
80	KB SINTANG	0,83	0,94	0,99	0,80	0,72